

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ranah politik didominasi oleh laki-laki karena laki-laki identik dengan perebutan kekuasaan dan kepemimpinan. Hal ini dapat dilihat pada salah satu lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu lembaga legislatif. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistika bahwa jumlah anggota laki-laki di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yaitu sebanyak 455 anggota, sedangkan jumlah anggota perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yaitu sebanyak 120 anggota di tahun 2019 (Badan Pusat Statistika, 2020). Data tersebut dapat mencerminkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan di keanggotaan legislatif serta menunjukkan pelaksanaan pemilihan legislatif di Indonesia.

Kota Batam adalah salah satu kota yang melakukan pemilihan legislatif di tahun 2019. Pelaksanaan pemilihan legislatif tersebut berlangsung dengan jumlah penduduk yang terdaftar dan menggunakan hak pilih sebanyak 1.299.256 serta memiliki enam daerah pemilihan yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dengan jumlah kursi sebanyak 50 kursi pada pemilihan DPRD Kota Batam (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, 2020).

Pemilihan legislatif di Kota Batam diikuti oleh enam belas partai politik nasional, setiap partai politik mengajukan bakal calon anggota legislatif namun hanya sebelas partai politik yang berhasil memenangkan pemilihan legislatif tersebut. Pengajuan bakal calon anggota legislatif berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu: “Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing partai politik”.

Pemilihan bakal calon anggota legislatif dilakukan dengan tujuan memilih seseorang yang memiliki kualitas dan layak untuk maju dalam pemilihan legislatif. Pelaksanaan pemilihan bakal calon anggota legislatif tidak terlepas dari rekrutemen politik yang dilakukan oleh partai politik. Rekrutemen politik merupakan salah satu fungsi partai politik dalam menyeleksi kepemimpinan (Budiardjo, 2015:408).

Politik rekrutmen calon anggota legislatif dapat dilihat pada Partai Keadilan Sejahtera. Salah satu anggota perempuan DPRD Kota Batam dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera merupakan partai yang konsisten dalam mencalonkan perempuan dalam pemilihan umum, kekonsistenan dalam pencalonan perempuan dalam pemilihan umum tidak terlepas dari kendala yang dihadapi pada saat perekrutan meskipun secara administratif tidak perbedaan antara pencalonan laki-laki dan perempuan, yaitu kesulitan dalam mencari calon legislatif dikarenakan banyak perempuan yang tidak mau ikut dalam kontesasi pemilihan umum.

Hal itu disebabkan karena pemahaman masyarakat mengenai politik dan partai politik dianggap sebagai hal yang kotor, padahal sebenarnya politik dan partai politik adalah mengenai bagaimana seni kita didalamnya. Mekanisme yang terdapat pada Partai Keadilan Sejahtera berbeda dengan partai politik lainnya, yaitu terletak pada saat partai politik menunjuk kader perempuan untuk maju

dalam kontesasi pemilihan umum maka kader tersebut harus bersedia, kecuali suami dari kader tersebut tidak menyetujui.

Demikian halnya terjadi pada partai politik Nasdem yang memiliki kendala dalam merekrut perempuan terletak pada pertimbangan yang dihadapi perempuan sendiri ketika maju ke jenjang yang lebih tinggi salah satunya adalah lembaga legislatif. Pertimbangan yang dihadapi perempuan seperti banyaknya kegiatan yang akan dijalani, meninggalkan anak dan suami.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 6 Ayat 3 bahwa:

Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.

Secara keseluruhan, setiap partai politik berhasil memenuhi kuota paling sedikit 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan, meskipun terdapat kendala yang dihadapi partai politik dalam merekrut bakal calon anggota perempuan namun keterpilihan perempuan pada pemilu 2019 sebagai bentuk keberhasilan perempuan untuk duduk di lembaga legislatif masih sangat sedikit.

Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam mengenai Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa pada daerah pemilihan Batam 2 terdapat tiga calon terpilih perempuan dan pada daerah pemilihan Batam VI terdapat satu calon terpilih perempuan, sedangkan pada daerah pemilihan Batam 1,3,4,5 tidak terdapat calon terpilih perempuan (Komisi Pemilihan Umum Kota Batam, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar pemenuhan kuota 30%

keterwakilan perempuan namun juga perlu memperhatikan bagaimana agar keterwakilan perempuan pada saat pemilihan umum juga berhasil dan meningkat.

Berkaitan dengan data tersebut, maka keterwakilan perempuan yang berhasil memenangkan pemilihan legislatif hanya berjumlah 4 perempuan dari 50 anggota DPRD Kota Batam sehingga keterwakilan perempuan di DPRD Kota Batam belum berhasil dalam memenuhi kuota 30% yaitu sebanyak 15 orang dari 50 jumlah anggota DPRD Kota Batam yang berarti keterwakilan perempuan di DPRD Kota Batam hanya 8% dari kuota yang telah ditentukan dan kekurangan 11 anggota agar terpenuhinya kuota tersebut.

Tabel 1.1 Jumlah Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Batam

No	Partai	Perempuan	Keseluruhan
1	Partai Demokrat	-	3
2	Partai GOLKAR	1	7
3	PDI Perjuangan	-	8
4	Partai Amanat Nasional	-	5
5	Partai Keadilan Sejahtera	1	5
6	Partai Persatuan Pembangunan	-	1
7	Partai Kebangkitan Bangsa	-	3
8	Partai HANURA	1	4
9	Partai GERINDRA	-	6
10	Partai NASDEM	1	7
11	Partai Solidaritas Indonesia	-	1
	Jumlah	4	50

Sumber: <https://kominfo.batam.go.id/>

Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang belum menunjukkan perubahan hingga saat ini akan berdampak pada setiap pembuatan dan penetapan kebijakan yang diambil. Kebijakan tersebut akan memiliki pengaruh besar pada persoalan yang dihadapi perempuan dan hal tersebut dapat diselesaikan oleh perempuan itu sendiri. Tidak hanya dalam persoalan mengenai perempuan, kebijakan-kebijakan publik lainnya apabila melibatkan perempuan dalam pembentukan, penyeleksian dan penetapan keputusan akan memiliki hasil yang berbeda dengan hasil sebelumnya dan akan memberikan keseimbangan pada setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Tidak hanya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif saja yang belum menunjukkan perubahan namun keterlibatan perempuan di lembaga legislatif juga masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari salah satu alat kelengkapan DPRD Kota Batam yaitu pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019-2024. Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Nomor: 25/KTPS/170/IX/2019 Tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA), terlihat bahwa ada 14 anggota pada badan tersebut namun tidak terdapat anggota perempuan di dalamnya.

Selain itu, salah satu fungsi dalam membentuk peraturan daerah, sedangkan anggota DPRD periode 2019-2024 hanya mampu membentuk satu Peraturan Daerah, empat Peraturan Daerah Inisiatif, dan dua Ranperda Tentang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Ranperda Tentang Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan namun terkait dengan penyampaian ide untuk kaum

perempuan, banyak anggota legislatif perempuan berkiprah diluar lingkungan legislatif. Hal ini berdasarkan dari wawancara yang dilakukan kepada salah anggota legislatif perempuan, yaitu Ibu Nina Mellanie dari Komisi 4, beliau mengatakan:

“Karena saya itu juga sebagai perwakilan perempuan, tentu saya juga harus memikirkan para perempuan yang telah menitipkan suaranya kepada saya. Jadi, kebijakan-kebijakan yang saya lakukan, kebetulan saya ini bermitra dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, mitra Komisi 4 Dinas Perempuan & KB. Nah itu merekrut perempuan itu selain mereka juga ada program untuk yang tadi saya bilang mengadakan pelatihan-pelatihan tentang politik perempuan itu juga satu, ada pelatihan-pelatihan yang seperti memasak, juga menjahit. Kalau yang pertama seperti seminar-seminar dan yang kedua ini memang praktek seperti bisa menjahit untuk memberdayakan perempuan. Jadi, mereka bisa mendapatkan ilmu lewat pokok pikiran saya dan setiap tahunnya ini memang menjadi pokok pikiran saya, selalu saya menempatkan pokok pikiran saya untuk pelatihan-pelatihan perempuan”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan juga aktif dalam bermitra dengan berbagai kelembagaan perempuan lainnya. Keterlibatan anggota legislatif perempuan terlihat dalam berbagai seminar dan kegiatan pelatihan yang dilakukan, hal ini dinilai bermanfaat dalam memberdayakan perempuan karena selain mendapatkan ilmu, kegiatan ini juga dapat menambah perekonomian. Seminar dan kegiatan pelatihan yang dilakukan adalah mengenai politik dan pelatihan lainnya yang berkaitan dengan perempuan, seperti memasak dan menjahit.

Berdasarkan uraian tersebut maka terlihat bahwa anggota legislatif perempuan masih kurang optimal dalam berpartisipasi di kelembagaan legislatif sehingga kondisi ini tentu menunjukkan sikap kekurangpahaman terhadap masalah-masalah strategis yang dialami perempuan dengan tugas yang dimiliki sebagai anggota legislatif perempuan.

Tidak terlepas atas permasalahan tersebut, penelitian mengenai keterwakilan perempuan di lembaga legislatif khususnya pada DPRD Kota Batam sangat sedikit. Atas dorongan tersebut pentingnya kajian ini untuk dilakukan dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Keterlibatan Perempuan Pada Keanggotaan Legislatif DPRD Kota Batam Periode 2019-2024”**.

1.2 Fokus Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat ruang lingkup permasalahan yang sangat luas, sehingga tidak semua permasalahan dapat dijangkau dan terselesaikan. Hal ini memerlukan pembatasan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Ruang lingkup permasalahan dan fokus dalam penelitian ini adalah keterlibatan perempuan di keanggotaan legislatif DPRD Kota Batam periode 2019-2024.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan yang disusun jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2016). Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, dapat diuraikan rumusan masalah pada penelitian ini adalah: bagaimana keterlibatan perempuan pada keanggotaan legislatif DPRD Kota Batam Periode 2019-2024?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan landasan dalam melakukan penelitian yang akan dilaksanakan, sehingga pengerjaan penelitian tersusun dengan rapi dan

terarah. Tujuan penelitian juga untuk menemukan, mengembangkan, membuktikan, dan terkait dengan rumusan masalah (Sugiyono, 2016). Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan perempuan pada keanggotaan legislatif DPRD Kota Batam pada periode 2019-2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:291) setiap penelitian memiliki manfaat yang terbagi atas dua sifat yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis memberikan manfaat pada pengetahuan dan manfaat secara praktis memberikan manfaat pada pemecahan masalah yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Penelitian Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan secara khusus dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai keterlibatan perempuan pada keanggotaan legislatif dan hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pedoman kepada penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Penelitian Secara Praktis
 - 1 Bagi calon pendidik, penelitian yang dilakukan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman untuk diimplementasikan kepada masyarakat.
 - 2 Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah khususnya anggota legislatif agar dapat meningkatkan partisipasi perempuan di dunia politik.

3 Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan dan mengembangkan pengetahuan kepada masyarakat mengenai partisipasi politik serta pentingnya partisipasi perempuan dalam politik.



THE
Character Building
UNIVERSITY